LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… /POJK.03/2021

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

1. Umum

Salah satu penyebab kegagalan Bank yaitu Penyaluran dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank mengelola konsentrasi portofolio Penyaluran dana. Konsentrasi tersebut selain ditimbulkan oleh eksposur Pembiayaan, juga dapat ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap faktor pasar tertentu atau eksposur yang timbul dari kegiatan pendanaan dalam hal suatu Bank secara khusus bergantung pada segmen nasabah atau sumber pendanaan tertentu. Dengan semakin kompleks hubungan antara perorangan dengan suatu perusahaan, dan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, Bank harus dapat secara akurat mengidentifikasi dan menentukan pihak lawan dalam kaitan dengan pengukuran eksposur risiko konsentrasi tersebut.

Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyaluran dana Bank terutama Penyaluran dana Besar (large exposure) kepada satu Nasabah Penerima Fasilitas atau suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Basel Committee on Banking Supervision pada tahun 2014 menerbitkan Basel III: supervisory framework for measuring and controlling large exposures. Pengaturan terkait Penyaluran dana Besar membatasi kerugian maksimum yang dapat dihadapi oleh Bank dalam hal terjadi kegagalan pihak lawan secara tiba-tiba. Pembatasan tersebut ditetapkan pada tingkat yang dianggap tidak membahayakan solvensi Bank.

Kerangka Penyaluran Dana Besar juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi contagion risk antar global systemically important banks sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan global. Kerangka tersebut juga dipandang sebagai metode yang berguna untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap shadow banking system.

Risiko atas Penyaluran dana Besar bukan merupakan satu-satunya jenis risiko konsentrasi yang dapat merusak ketahanan Bank. Jenis risiko konsentrasi lain termasuk konsentrasi eksposur sektoral dan geografis, ketergantungan pada sumber pendanaan yang terkonsentrasi, dan posisi neto short pada Surat Berharga karena Bank dapat mengalami kerugian yang signifikan jika harga Surat Berharga tersebut meningkat. Kerangka pengaturan Penyaluran dana Besar fokus pada kerugian yang timbul karena kegagalan bayar dari satu individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan tidak memperhitungkan jenis lain dari risiko konsentrasi

1. MANAJEMEN RISIKO
2. Dalam melakukan Penyaluran dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat Penyaluran dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko antara lain dilakukan dengan menetapkan batas Penyaluran dana. Penetapan batas Penyaluran dana tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis dampak Penyaluran dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank yaitu dengan mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu Penyaluran dana maupun dampak Penyaluran dana terhadap kebijakan dan strategi diversifikasi portofolio Bank secara menyeluruh. Selain penetapan batas terhadap eksposur kepada pihak tertentu, untuk keperluan internal, Bank dapat menetapkan batas berdasarkan area geografis dan sektor industri tertentu.
3. Analisis dampak Penyaluran dana terhadap struktur neraca dan profil risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko pembiayaan terhadap sekumpulan Penyaluran dana yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan/atau jangka waktu. Risiko pembiayaan tersebut diukur antara lain berdasarkan data historis tingkat kegagalan dan perpindahan kualitas Penyaluran dana (credit rating migration) selama periode tertentu.
4. Selain melakukan analisis terhadap konsentrasi Penyaluran dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas dan sekumpulan Penyaluran dana sebagaimana dijelaskan pada angka 2, Bank juga harus melakukan analisis terhadap alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio Penyaluran dana. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank dapat memiliki komposisi portofolio yang optimal dari struktur neraca Bank secara keseluruhan. Dalam menentukan alokasi tersebut, Bank harus mempertimbangkan korelasi risiko antara komponen portofolio Penyaluran dana dengan tingkat volatilitas dari masing-masing komponen portofolio.
5. PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK NASABAH PENERIMA FASILITAS

Penentuan Pihak Terkait dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

1. Kepemilikan Saham

Hubungan pengendalian antara lain dapat timbul sebagai akibat kepemilikan saham yang memiliki hak suara pada suatu pihak, berbentuk perorangan atau perusahaan terhadap suatu perusahaan. Penentuan kepemilikan saham mencakup kepemilikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, seperti saham dari Pihak Terkait/anggota kelompok lain atau saham dari keluarganya.

1. Pihak Terkait dengan Bank
2. Pengendali Bank berdasarkan kepemilikan saham;

Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank dalam hal pihak tersebut memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank.

Dalam hal pihak yang menjadi pengendali Bank dikendalikan oleh pihak lain berbentuk perorangan atau perusahaan, pengendali dari pengendali ditetapkan pula sebagai pengendali Bank. Dalam menentukan pengendali dari pengendali tersebut tidak ada batas jenjang tertentu sehingga perlu ditelusuri sampai dengan pengendali akhir (ultimate shareholder).

Dalam hal pengendali Bank berupa perorangan, pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara vertikal atau horizontal dari perorangan tersebut juga merupakan pengendali Bank. Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dijelaskan tersebut dicontohkan dengan struktur kepemilikan sebagaimana dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1 Pengendali Bank

Pengendali Akhir

≥ 10% saham

PT A

≥ 10% saham

PT A1

≥ 10% saham

Bank

Gambar 1 merupakan contoh dari Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT ”A1”. Pengendali dari pengendali pada Gambar 1 adalah PT ”A” dan pengendali akhir. Berdasarkan hal tersebut maka pengendali akhir, PT ”A”, dan PT ”A1” ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Gambar 2. Pengendali Bank secara bersama-sama

Pengendali Akhir

≥ 10% saham

PT A

≥ 10% saham

PT A1

≥ 10% saham

Bank

PT A2

7% saham

3% saham

Gambar 2 merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara bersama-sama oleh PT ”A1” dan PT ”A”. Berdasarkan hal tersebut, pengendali akhir, PT ”A”, PT ”A1”, dan PT ”A2” ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

1. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali

Dalam menentukan pengendali dari pengendali Bank, tidak ada batas jenjang tertentu untuk menentukan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank. Penelusuran badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank dilakukan sampai dengan badan hukum terakhir (ultimate subsidiary).

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 3.

Gambar 3 Badan hukum yang dikendalikan Bank

Pengendali Akhir

≥ 10% saham

PT A

≥ 10% saham

PT A1

≥ 10% saham

Bank

PT A2

7% saham

3% saham

PT B1

PT B

*Ultimate Subsidiary*

≥ 10% saham

≥ 10% saham

≥ 10% saham

PT C1

PT C2

≥ 25% saham

≥ 25% saham

PT C

≥ 10% saham dan merupakan

porsi terbesar

Manajer Investasi

Kontrak Investasi Kolektif

Pada Gambar 3, PT ”B1” merupakan badan hukum yang dikendalikan Bank. PT ”B” dan badan hukum terakhir (ultimate subsidiary) juga merupakan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank melalui PT ”B1” secara berjenjang. Berdasarkan hal tersebut, badan hukum terakhir (ultimate subsidiary), PT ”B” dan PT ”B1” merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

1. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertindak sebagai pengendali

Dalam menentukan parameter pengendalian dari sisi kepemilikan saham, persentase yang digunakan sebesar:

1. 10% (sepuluh persen) atau lebih dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi terbesar; atau
2. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepemilikan atas saham perusahaan tersebut.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 4.

Gambar 4 Perusahaan afiliasi

Pengendali Akhir

≥ 10% saham

PT A

≥ 10% saham

PT A1

≥ 10% saham

Bank

PT A2

7% saham

3% saham

PT B1

PT B

*Ultimate Subsidiary*

≥ 10% saham

≥ 10% saham

≥ 10% saham

PT C1

PT C2

≥ 25% saham

≥ 25% saham

PT C

≥ 10% saham dan merupakan

porsi terbesar

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank adalah PT ”A” dan pengendali akhir. PT ”A” memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PT ”C1” dan PT ”C2”. Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh persen) saham PT ”C” dan kepemilikan saham tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT ”C”, PT ”C1”, dan PT ”C2”, ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank

1. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam pengaturan BMPD, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Bank dan/atau Pihak Terkait dengan Bank memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau Penyaluran dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran dana kepada Pihak Terkait.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 5.

Gambar 5 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Pengendali Akhir

≥ 10% saham

PT A

≥ 10% saham

PT A1

≥ 10% saham

Bank

PT A2

7% saham

3% saham

PT B1

PT B

*Ultimate Subsidiary*

≥ 10% saham

≥ 10% saham

≥ 10% saham

PT C1

PT C2

≥ 25% saham

≥ 25% saham

PT C

≥ 10% saham dan merupakan

porsi terbesar

Manajer Investasi

Kontrak Investasi Kolektif

4%

5%

5%

Pada Gambar 5, Bank beserta Pihak Terkait Bank (PT “C2” dan PT “B1”) secara kumulatif memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham pada manajer investasi yang mengelola portofolio KIK. Berdasarkan hal tersebut, penanaman dana pada KIK dan/atau Penyaluran dana kepada manajer investasi KIK ditetapkan sebagai Penyaluran dana kepada Pihak Terkait.

1. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait

Dari sisi kepemilikan saham, untuk menentukan hubungan pengendalian antara 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah Penerima Fasilitas, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Nasabah Penerima Fasilitas lain dan porsi kepemilikan tersebut adalah porsi terbesar; atau
2. Nasabah Penerima Fasilitas, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Nasabah Penerima Fasilitas lain.

Dalam hal 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas memiliki saham Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) atau angka 2), kedua Nasabah Penerima Fasilitas tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas berlaku pula dalam hal 1 (satu) pihak yang sama menjadi pengendali beberapa Nasabah Penerima Fasilitas, yaitu dalam hal pihak tersebut memiliki saham di beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) dan/atau angka 2). Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 6.

Gambar 6 Nasabah Penerima Fasilitas dalam satu pengendalian

Pengendali

Nasabah 1

Nasabah 2

PT A1

Nasabah 3

≥ 25% saham

≥ 25% saham

10% saham

≥ 25% saham

5% saham

Bank

Pembiayaan 1

Pembiayaan 3

Pembiayaan 2

Pemegang saham lain dengan porsi kepemilikan masing-masing   
< 15% saham

85% saham

Pada Gambar 6, Bank memberikan Pembiayaan masing-masing kepada Nasabah “1”, Nasabah “2”, dan Nasabah “3”. Dapat dilihat bahwa Nasabah “1” dan Nasabah “2” dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masing-masing 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Nasabah “1” dan Nasabah “2” sehingga Nasabah “1” dan Nasabah “2” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Nasabah “3” dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Nasabah “1” dan Nasabah “2”.

Pengendalian terhadap Nasabah “3” oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Nasabah “1” dan Nasabah “2” dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi terbesar. Dengan demikian, Nasabah “1”, Nasabah “2”, dan Nasabah “3” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan BMPD untuk keseluruhan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

1. Kepengurusan

Hubungan pengendalian dapat timbul sebagai akibat hubungan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Keuangan

Hubungan pengendalian dapat diakibatkan melalui hubungan keuangan yang dianalisis berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan (financial interdependence)

Beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak sebagai berikut.

1. Nilai transaksi antara kedua belah pihak. Dalam hal terdapat transaksi yang materiil antara 1 (satu) pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan kesehatan keuangan pihak tersebut dipengaruhi secara langsung oleh pihak lain, antara pihak-pihak tersebut ditetapkan memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence). Contoh transaksi yang materiil yaitu dalam hal 50% (lima puluh persen) atau lebih pendapatan kotor atau pengeluaran kotor secara tahunan dari satu pihak berasal dari transaksi dengan pihak lain.
2. Hubungan transaksi antar pihak yang dapat menyebabkan ketergantungan keuangan sebagai berikut:
3. ketergantungan penjualan pada pihak tertentu;
4. ketergantungan dalam proses produksi dimana produksi atau hasil produksi dari satu pihak secara signifikan bergantung kepada pihak lain; dan/atau

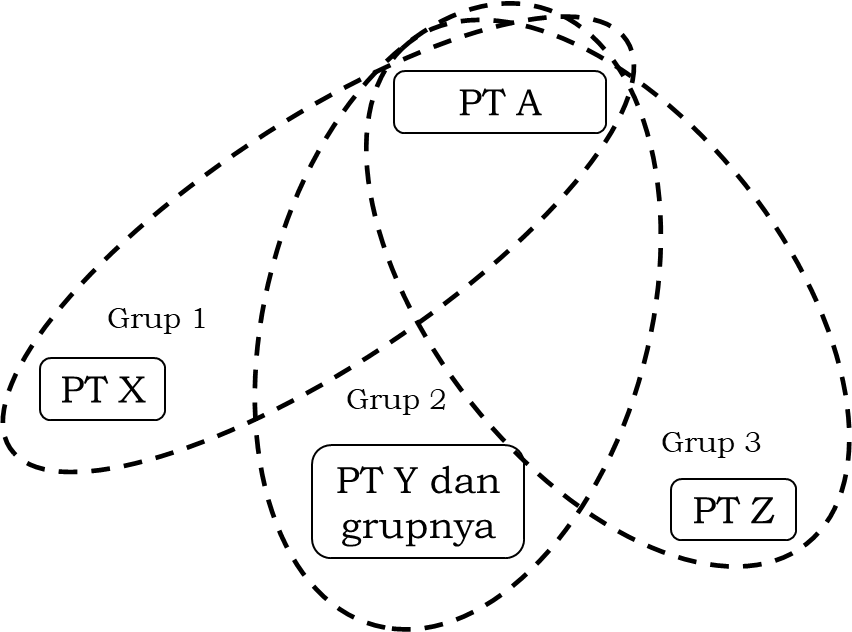
Contoh huruf a) dan huruf b):

PT A dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan mitra yaitu PT X, PT Y, dan PT Z, dimana kemitraan masing-masing memenuhi kriteria ketergantungan penjualan dan/atau ketergantungan dalam proses produksi.

Bank memberikan Pembiayaan kepada PT A. Selain itu, Bank juga memberikan Pembiayaan kepada PT X, PT Y, dan PT Z dalam rangka memenuhi penjualan atau proses produksi yang berkaitan dengan PT A.

Sepanjang tidak terdapat hubungan pengendalian lainnya, maka PT A dan masing-masing mitra ditetapkan sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan perhitungan BMPD untuk masing-masing sebagai berikut:

Gambar X Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas karena Ketergantungan Penjualan dan/atau Ketergantungan dalam Proses Produksi



* + - 1. Grup 1 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank
      2. Grup 2 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank
      3. Grup 3 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank

Namun terdapat pengecualian apabila antar PT X, PT Y, dan/atau PT Z terdapat keterkaitan lainnya baik itu keterkaitan kepemilikan, keuangan, dll maka perhitungan BMPD harus digabungkan.

Sebagai contoh, apabila PT X dan PT Z terhadap keterkaitan kepemilikan, maka fasilitas penyaluran dana yang diberikan kepada PT X dan PT Z dijadikan satu dengan fasilitas penyaluran dana yang diberikan kepada PT A dan dikenakan BMPD sebesar 25% dari modal inti.

1. ketergantungan terhadap pinjaman maupun sumber dana dari pihak tertentu sehingga pada saat terjadi wanprestasi dari sumber dana, tidak terdapat alternatif sumber dana lain.

Contoh:

Sumber dana untuk membayar utang satu pihak kepada pihak lain yaitu sama untuk setiap pihak dan pihak tersebut tidak memiliki sumber dana lain untuk melakukan pelunasan utang.

Analisis hubungan transaksi tersebut dititikberatkan hanya kepada hubungan transaksional antara satu pihak secara langsung dengan pihak lain.

1. Arus kas dari satu pihak akan terganggu secara signifikan akibat gangguan arus kas dari pihak lain sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam membayar kewajiban kepada Bank. Selain itu, dalam hal satu pihak mengalami gagal bayar, hal tersebut dapat berkorelasi dengan gagal bayar pihak lain.
2. Pengalihan risiko melalui penjaminan

Faktor lain yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak yaitu adanya pengalihan risiko pembiayaan melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

Bentuk penjaminan yang diberikan dalam menentukan hubungan keuangan dapat terdiri dari berbagai bentuk seperti: personal guarantee, corporate guarantee, dan/atau aval.

Hubungan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk Pihak Terkait dengan Bank atau bukan. Dalam penentuan Pihak Terkait, dalam hal di antara pihak yang mempunyai hubungan keuangan merupakan Pihak Terkait dengan Bank maka keseluruhan pihak yang mempunyai hubungan keuangan tersebut ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.

Dalam hal kriteria hubungan keuangan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya ketergantungan keuangan yang menyebabkan 2 (dua) atau lebih pihak menjadi kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, Bank dapat tidak menggolongkan suatu Nasabah Penerima Fasilitas ke dalam kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sepanjang Bank dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa suatu Nasabah Penerima Fasilitas yang secara ekonomi berkaitan erat dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain dapat mengatasi kesulitan keuangan atau mengatasi gagal bayar yang dialami Nasabah Penerima Fasilitas lain misalnya dengan cara menemukan mitra bisnis atau sumber pendanaan alternatif dalam periode waktu yang wajar.

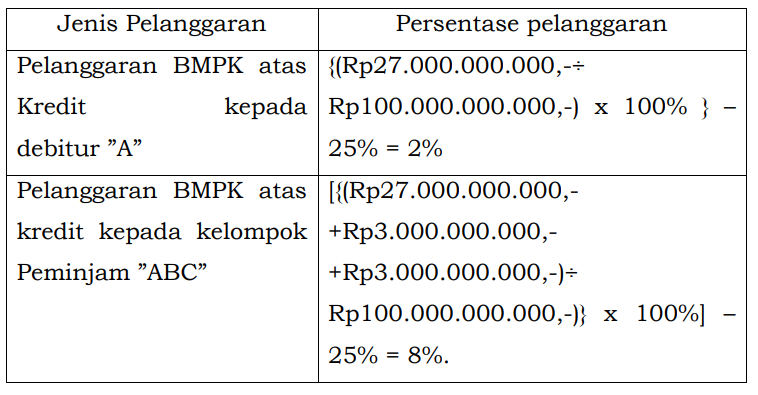
1. PERHITUNGAN PENYALURAN DANA
2. Perhitungan BMPD untuk Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas
3. Contoh perhitungan BMPD untuk kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut:

Bank ”XYZ” memberikan fasilitas pembiayaan kepada 3 (tiga) debitur yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Debitur | Nilai Tercatat |
| “A” | Rp27.000.000.000,- |
| “B” | Rp3.000.000.000,- |
| “C” | Rp3.000.000.000,- |

Masing-masing debitur mempunyai hubungan pengendalian sehingga digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yaitu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”ABC”. Modal Inti (tier 1) Bank ”XYZ” yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menetapkan bahwa Penyaluran dana Bank untuk debitur ”A”, debitur ”B”, debitur ”C”, dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”ABC” ditetapkan masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank yaitu sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) Pelanggaran BMPD dari Penyaluran dana yang dilakukan Bank ”XYZ” sebagai berikut:

1. Contoh pengelompokan Nasabah Penerima Fasilitas dalam beberapa kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Bank “FSI” memiliki debitur yaitu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas “A” yang terdiri dari “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, dan “G”, serta kelompok Nasabah Penerima Fasilitas “W” yang terdiri dari “X”, “Y”, “Z”, dan “G”. Adapun komposisi kepemilikan masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas “A” dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas “W” dapat dilihat pada Gambar 7.

Bank ”FSI” kemudian memberikan pembiayaan pula kepada ”G”, yang dimiliki oleh ”E” sebesar 26% (dua puluh enam persen) dan ”Y” sebesar 64% (enam puluh empat persen). ”E” merupakan anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” sementara ”Y” merupakan anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W”.

Dalam perhitungan BMPD, Penyaluran dana yang diberikan Bank ”FSI” kepada ”G” dihitung pula sebagai Penyaluran dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W”.

Modal Inti (tier 1) Bank ”FSI” sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perhitungan BMPD kepada masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W” sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ”FSI” sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Penyaluran dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W” sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Penyaluran dana yang diperkenankan kepada ”G” harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Penyaluran dana yang diperkenankan kepada ”G” harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut: | Rp20.000.000.000,- + x ≤ Rp25.000.000.000,- |
| Penyaluran dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W” ditambah Penyaluran dana kepada ”G” harus lebih kecil dari atau sama dengan 25% dari Modal Inti (tier 1) Bank. | Rp15.000.000.000,- + x ≤ Rp25.000.000.000,- |
| Keterangan:  ”x” merupakan jumlah maksimum Penyaluran dana yang dapat diberikan kepada ”G” sehingga jika ”x” ditambahkan kepada eksposur masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”W” tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ”FSI” | |

Berdasarkan hal tersebut, Penyaluran dana maksimum yang dapat diberikan kepada ”G” sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan ”G” ditetapkan sebagai anggota dari masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” dan ”W”.

Dengan demikian, perhitungan eksposur Nasabah Penerima Fasilitas ”G” dalam kaitan dengan menentukan jumlah eksposur dari masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ”A” dan ”W” yang memiliki pengendalian terhadap Nasabah Penerima Fasilitas tidak dihitung secara proporsional, kecuali dalam hal hubungan pengendalian disebabkan semata-mata karena hubungan keuangan yang disebabkan oleh adanya penjaminan.

Gambar 7 Pengelompokan Nasbaah Penerima Fasilitas dalam beberapa Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

A

B

E

C

D

F

G

47%

39%

53%

100%

99%

26%

W

Y

C

F

50%

64%

85%

55%

1. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran dana Besar merupakan seluruh Penyaluran dana dalam posisi banking book dan trading book. Posisi trading book untuk instrumen keuangan seperti obligasi dan instrumen saham yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dibatasi dengan batas BMPD namun konsentrasi eksposur pada komoditas atau mata uang tertentu tidak dibatasi dengan batas BMPD.

Eksposur Penyaluran dana yang memperoleh bobot risiko 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko pembiayaan pendekatan standar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar, juga diperhitungkan dalam perhitungan BMPD.

Penjelasan terkait beberapa jenis Penyaluran dana tersebut sebagai berikut:

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah

BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk posisi banking book dan posisi trading book dihitung berdasarkan perhitungan tagihan bersih Transaksi Lindung Nilai Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi lindung nilai syariah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Sebagai tambahan dari perhitungan BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah tersebut, Transaksi Lindung Nilai Syariah berupa forward dan swap dalam posisi trading book dihitung berdasarkan posisi leg transaksi dalam posisi trading book yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu posisi leg transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyaluran dana berupa posisi long.

1. Surat Berharga Syariah
2. Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset)

Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) yaitu bentuk Surat Berharga Syariah dimana harga/nilai dari Surat Berharga Syariah tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga/nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai instrumen dasar seperti reksa dana atau Efek Beragun Aset (EBA).

Dalam perhitungan BMPD atas Surat Berharga Syariah tersebut, Bank dapat menggunakan metode look-through approach (LTA) atau tidak menggunakan metode LTA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Metode LTA yaitu BMPD untuk masing-masing Entitas Referensi tersebut dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset/instrumen dasar dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga Syariah secara keseluruhan.

Pengaturan untuk Surat Berharga Syariah dengan metode LTA sebagai berikut:

* 1. Surat Berharga Syariah dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat sederajat (pari passu)

Contoh:

Manajer Investasi PT “Prima” menerbitkan reksa dana terbuka senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Bank membeli 2% (dua persen) bagian dari Surat Berharga Syariah berupa reksa dana tersebut dengan harga beli sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Aset yang mendasari sertifikat reksa dana tersebut terdiri dari obligasi PT “A” sebesar 60% (enam puluh persen) dan obligasi PT “B” sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai aset reksa dana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, BMPD atas pembelian Surat Berharga Syariah reksa dana terbuka ditetapkan kepada PT “A” dan PT “B”, yang masing-masing dihitung secara proporsional terhadap harga beli reksa dana yaitu:

1. Penyaluran dana kepada PT “A” = Rp20.000.000,- x 60% = Rp12.000.000,-; dan
2. Penyaluran dana kepada PT “B” = Rp20.000.000,- x 40% = Rp 8.000.000,-.
   1. Surat Berharga Syariah dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat senioritas yang berbeda

Contoh:

Aktivitas sekuritisasi aset dimana penerbitan Surat Berharga Syariah oleh penerbit EBA yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan yang mendasari dari pembiayaanur asal (originator) dimana arus kas dari kumpulan aset yang mendasari (underlying asset) tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi paling sedikit 2 (dua) posisi risiko yang memiliki kelas (tranche) berbeda dan mencerminkan tingkatan risiko pembiayaan yang berbeda.

Perhitungan BMPD atas Penyaluran dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah dalam bentuk struktur diukur untuk setiap kelas (tranche) dalam struktur dengan asumsi distribusi pro-rata terhadap kerugian antar investor dalam suatu kelas (tranche).

Perhitungan nilai Penyaluran dana terhadap aset yang mendasari (underlying asset) yaitu:

1. menentukan nilai terendah antara nilai kelas (tranche) di mana Bank berinvestasi dengan nilai nominal masing-masing aset yang mendasari (underlying asset); dan
2. menetapkan porsi pro-rata dari investasi Bank pada kelas (tranche) tersebut terhadap nilai yang ditentukan dalam huruf i).
3. Identifikasi risiko tambahan untuk pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset)

Dalam hal Bank melakukan pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset), Bank melakukan identifikasi pihak ketiga yang menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga Syariah tersebut dan bukan faktor risiko tambahan dalam aset yang mendasari (underlying asset). Pihak ketiga tersebut dapat menjadi faktor risiko untuk lebih dari satu Surat Berharga Syariah yang dibeli oleh Bank. Contoh pihak ketiga yaitu pembiayaanur asal (originator), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia pembiayaan pendukung.

Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga untuk menjadi sumber potensi risiko tambahan.

Dalam hal Bank menghitung BMPD untuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) tidak menggunakan metode LTA, Bank melakukan identifikasi risiko struktural yang melekat pada Surat Berharga Syariah dimaksud. Hal tersebut tidak berhubungan/independen dari hasil penilaian umum risiko tambahan.

Terkait identifikasi risiko tambahan, Bank melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank menggolongkan seluruh investasi pada Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) untuk menjadi satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan pihak ketiga.

Contoh:

1. untuk instrumen structured finance, penyedia fasilitas likuiditas atau sponsor dari program jangka pendek (asset-backed commercial paper, conduits, dan structured investment vehicles) dapat dijadikan pertimbangan sebagai faktor risiko tambahan. Nilai eksposur yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu jumlah nilai yang diinvestasikan pada instrumen tersebut.
2. untuk transaksi sintetis, pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller) yang menjual proteksi melalui CDS dapat menjadi sumber risiko tambahan dan faktor umum untuk menghubungkan struktur yang berbeda. Nilai eksposur yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu nilai persentase terhadap portofolio yang mendasari.
3. Bank dapat menambahkan Penyaluran dana lain (contoh: Pembiayaan) kepada pihak ketiga selain Penyaluran dana berupa pembelian Surat Berharga Syariah dalam perhitungan BMPD. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap fitur khusus dari Surat Berharga Syariah yang dihubungan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) dan peran pihak ketiga pada setiap transaksi.

Contoh:

Untuk pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller), sumber risiko tambahan untuk Bank yang melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) yaitu terjadinya gagal bayar dari pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller). Bank harus menjumlahkan investasi dalam Surat Berharga Syariah tersebut dengan eksposur yang secara langsung dimiliki Bank kepada pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller) karena kedua eksposur tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam hal pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller) mengalami gagal bayar. Dalam hal Bank mengabaikan bagian Penyaluran dana yang mendapat proteksi, hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko konsentrasi terhadap pihak yang mengambil alih risiko pembiayaan (protection seller).

1. Pembiayaan

Dalam hal Pembiayaan yang diberikan untuk pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dari pihak lain, perhitungan BMPD didasarkan pada:

1. persyaratan tanpa janji untuk dibeli kembali (without recourse), yang merupakan debitur yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang yang dialihkan; atau
2. persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse), yang merupakan debitur yaitu pihak yang menjual atau mengalihkan tagihan/Pembiayaan.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 8.

Gambar 8. Pembelian Tagihan/Pembiayaan

Pihak yang wajib

membayar

piutang/Pembiayaan

Penjual

Tagihan/Pembiayaan

Bank

(pembeli)

*Without Recourse*

Kredit

BMPD

Surat

Berharga

Hutang

Pihak yang wajib

membayar

piutang/Pembiayaan

Penjual

Tagihan/Pembiayaan

Bank

(pembeli)

*With Recourse*

Pembi

-ayaan

Pembiayaan

(Piutang)

Hutang

BMPD

1. Penyertaan Modal

Penyaluran dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai eksposur kepada perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan.

Adapun jumlah Penyaluran dana dalam bentuk penyertaan saham yaitu sebesar nilai tercatat seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyertaan. Untuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi (convertible sukuk) dengan opsi saham (equity options), yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan diperoleh Bank dalam hal surat investasi konversi (convertible sukuk) dikonversi menjadi saham.

Untuk jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham seperti transaksi opsi saham, Penyaluran dana yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu sebesar nilai keseluruhan saham yang akan dimiliki apabila opsi tersebut dieksekusi.

1. PENYALURAN DANA KEPADA BUMN

Contoh:

BUMN ”A” adalah BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol. BUMN “A” mempunyai 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT “AP1” dan PT “AP2”. Perhitungan BMPD menghitung Penyaluran dana secara langsung kepada BUMN dan kepada kelompok BUMN tersebut.

Bank “X” memberikan Pembiayaan kepada BUMN ”A”, PT “AP1”, dan PT “AP2” (selain Pihak Terkait Bank “X”) sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nasabah | Nilai Tercatat Pembiayaan | Keterangan |
| BUMN “A” | Rp10.000.000.000,- | Pembiayaan yang diperoleh bertujuan untuk pembangunan kompleks perkantoran BUMN “A” |
| PT “AP1” | Rp6.000.000.000,- |  |
| PT “AP2” | Rp4.000.000.000,- |  |
| Total Penyaluran Dana | Rp20.000.000.000,- | |

Keterangan:

1. Modal Bank “X” = Rp110.000.000.000,-
2. Modal Inti (*tier 1*) Bank “X” = Rp100.000.000.000,-
3. BMP Bank “X” kepada kelompok usaha BUMN “A” = 25% dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “X” = Rp25.000.000.000,-
4. Dengan demikian, Bank “X” masih dapat memberikan Penyaluran Dana kepada kelompok usahan BUMN “A” sebesar Rp25.000.000.000,- - Rp20.000.000.000,- = Rp5.000.000.000,-

Dalam hal BUMN ”A” mengajukan permohonan Pembiayaan baru yang bertujuan untuk pembangunan jalan tol, Penyaluran dana baru yang dapat diberikan kepada BUMN ”A” harus dihitung secara kumulatif, yaitu berdasarkan eksposur yang telah dimiliki Bank atas kelompok usaha BUMN ”A” terhadap batasan 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank ”X” sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| BMPD kepada BUMN untuk tujuan pembangunan (A) | 30% x Rp100.000.000.000,- = Rp33.000.000.000,- |
| Total Penyaluran Dana yang telah diberikan (B) | Rp20.000.000.000.- |
| Penyaluran Dana baru yang dapat diberikan untuk pembangunan jalan tol (A – B) | Rp13.000.000.000,- |

BMPD ini lebih besar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dibandingkan apabila Pembiayaan baru tersebut bukan untuk tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. PERLAKUAN BMPD TERTENTU

Contoh:

Dalam menghitung BMPD atas Penyaluran dana yang dijamin Prime Bank yang merupakan pihak terkait Bank, Penyaluran dana yang melebihi jumlah pengecualian tetap diperhitungkan dalam perhitungan BMPD.

Informasi terkait Penyaluran dana Bank “X” kepada Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Modal Bank “X” | Rp150.000.000.000,- |
| BMPD Pihak Terkait = 10% dari Modal Bank “X” | Rp15.000.000.000,- |
| Penyaluran Dana oleh Bank “X”: |  |
| 1. Pembelian Surat Berharga Syariah PT “B” | Rp5.000.000.000,- |
| 1. Penempatan jangka panjang pada Bank “C” | Rp80.000.000.000,- |
| 1. Pembelian Surat Berharga PT “D” | Rp20.000.000.000,- |
| 1. Pembiyaaan pada PT “A” | Rp100.000.000.000,- |
| Total Penyaluran Dana | Rp205.000.000.000,- |
| PT “A”, PT “B”, Bank “C”, *Prime Bank* dan PT “D” yaitu Pihak Terkait dengan Bank “X” | |
| SBLC yang diterima Bank “X” dari Bank “Z” (*Prime Bank*) untuk penjaminan PT “B” | Rp90.000.000.000,- |
| SBLC yang diterima Bank “X” dari Bank “Z” (*Prime Bank*) untuk penjaminan PT “C” | Rp90.000.000.000,- |

Perhitungan:

1. Bagian Penyaluran dana yang memperoleh jaminan berupa SBLC dari Prime Bank yang merupakan Pihak Terkait Bank dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD yaitu paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank ”X” untuk Penyaluran dana kepada Pihak Terkait

Batas pengecualian = 90% x Rp 150.000.000.000,-   
= Rp135.000.000.000,-

Batas tersebut untuk keseluruhan Penyaluran Dana

1. Kelebihan SBLC = Rp90.000.000.000,- + Rp90.000.000.000,- Rp135.000.000.000,- = Rp45.000.000.000,-

Kelebihan SBLC sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak dapat digunakan untuk menjamin Penyaluran dana kepada PT ”A” dan PT ”D”, termasuk kelebihan eksposur BMPD kelompok.

1. Pelanggaran BMPD sebesar:

|  |  |
| --- | --- |
| Total Penyaluran Dana | Rp205.000.000.000,- |
| SBLC yang diperhitungkan | (Rp135.000.000.000,-) |
| Total Penyaluran Dana yang menjadi perhitungan BMPD | Rp70.000.000.000,- |
| BMPD PIhak Terkait | (Rp15.000.000.000,-) |
| Pelanggaran BMPD Pihak Terkait | Rp55.000.000.000,- |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal…

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… /POJK.03/2021

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

Bagian A

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR

BAGI BANK UMUM SYARIAH

LAPORAN PENYALURAN DANA SECARA INDIVIDU

Nama Bank : PT Bank… (individu)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | | Penyaluran Dana pada Tanggal Laporan (sebelum Teknik MRK) | | | | | | Modal | Modal Inti |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI | VII.1 | VII.2 | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaminan/Agunan yang Diberikan (Teknik MRK) | | | | | | | | Kualitas | Keterangan |
| Bentuk Jaminan/ Agunan | Bagian yang Dijamin | Penerbit Jaminan/ Agunan | Peringkat Penjamin | Lembaga Pemeringkat | Tanggal Pemeringkatan | Jangka Waktu | |
| Awal | Jatuh Tempo |
| XIII | XIVV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX.1 | XIX.2 | XX | XXI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAPORAN PENYALURAN DANA SECARA KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank… (konsolidasi )

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | | Bank | | | | | |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI | VII.1 | VII.2 | VIII | IX | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusahaan Anak | | | | | | Modal Konsolidasi | Konsolidasi | | Kualitas | Keterangan |
| Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana setelah Teknik MRK | | Kurs | Jumlah Pneyaluran Dana setelah Teknik MRK | |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing | Rupiah | Valuta Asing |
| XI | XII.1 | XII.2 | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pedoman Pengisian Laporan Penyaluran Dana

Dalam tabel ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.
2. Penyaluran Dana kepada 20 (dua puluh) Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait yang memperoleh jumlah Penyaluran Dana terbesar dengan tidak memperhatikan persentase jumlah Penyaluran Dana terhadap Modal Inti (tier 1) Bank.
3. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Debitur berupa “unknown client” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “unknown client”.

1. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

1. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

1. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

1. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
| 1. | Pihak Terkait |  |
| * 1. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| * 1. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| * 1. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |
| * 1. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| * 1. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| * 1. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| * 1. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| * 1. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| * 1. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| * 1. Hubungan keuangan | 0310 |
| * 1. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK |  |
| * 1. Penjaminan | 0330 |
| * 1. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait |  |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 1. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas |  |
| * 1. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| * 1. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| * 1. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| * 1. Penjaminan | 9940 |
| * 1. Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3 | Pembiayaan | 30 |
| 4. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 5. | Penyertaan Modal | 40 |
| 6. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 7. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 8. | Benutuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 9. | Garansi | 65 |
| 10. | *Letter of Credit* (L/C) | 70 |
| 11. | *Standby Letter of Credit* (SBLC) | 80 |
| 12. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

1. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Modal Inti (*tier* 1)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI | 45 |
| 7. | SBN | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

1. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

1. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
| 1. | Moody’s Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor’s | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

1. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

1. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kualitas | Sandi |
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

1. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Bagian B

LAPORAN PENYALURAN DANA BESAR

Nama Bank : PT Bank… (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | Penyaluran Dana pada Tanggal Laporan (sebelum Teknik MRK) | | | | | | Modal Inti | % Total Penyaluran Dana dengan Modal Inti (Tier 1) |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI.1 | VI.2 | VII | VIII | IX | X | XI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaminan/Agunan yang Diberikan (Teknik MRK) | | | | | | | | | | | Kualitas | Keterangan |
| Bentuk Jaminan/ Agunan | Bagian yang Dijamin | Penerbit Jaminan/ Agunan | Peringkat Penjamin | Lembaga Pemeringkat | Tanggal Pemeringkatan | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana setelah Teknik MRK (Bagian yang tidak Dijamin) | | |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing | % Total Penyaluran Dana dengan Modal Inti (Tier 1) |
| XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII.1 | XVIII.2 | XIX | XX | XXI | XXI | XXII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pedoman Pengisian Laporan Penyaluran Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyaluran Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (tier 1) Bank kepada selain Pihak Terkait, sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK. Pada tabel ini tidak termasuk Penyaluran Dana Besar yang telah dikecualikan dan dilaporkan melalui Laporan Pengecualian Penyaluran Dana Besar.

1. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Debitur berupa “unknown client” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “unknown client”.

Bagi Bank yang tidak mempunyai Penyaluran Dana Besar, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan “Nihil”.

1. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 5. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

1. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

1. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
| 1. | Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 2. | Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas |  |
| a. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| b. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| d. Penjaminan | 9940 |
| e Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3 | Pembiayaan | 30 |
| 4. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 5. | Penyertaan Modal | 40 |
| 6. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 7. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 8. | Benutuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 9. | Garansi | 65 |
| 10. | *Letter of Credit* (L/C) | 70 |
| 11. | *Standby Letter of Credit* (SBLC) | 80 |
| 12. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

1. Modal Inti (*tier* 1)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*tier* 1)

Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (tier 1) Bank sebelum menerapkan Teknik MRK.

1. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI | 45 |
| 7. | SBN | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

1. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

1. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
| 1. | Moody’s Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor’s | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

1. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah setelah menerapkan Teknik MRK. Penyaluran Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyaluran Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas atau salah satu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas atau salah satu anggota terkait setelah menerapkan Teknik MRK. Penyaluran Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyaluran Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Persentasi Penyaluran Dana dengan Modal Inti (Tier 1)

Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (tier 1) Bank setelah menerapkan Teknik MRK.

1. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kualitas | Sandi |
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

1. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu

Bagian B

LAPORAN PENGECUALIAN PENYALURAN DANA BESAR

Nama Bank : PT Bank… (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | Penyaluran Dana pada Tanggal Laporan | | | | | | Modal Inti |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI.1 | VI.2 | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perlakuan BMPD Tertentu | | | | |
| Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu | Jumlah Penyaluran Dana dengan Perlakuan BMPD Tertentu | | | |
| Rupiah | Valuta Asing | % Total Penyaluran Dana dengan Modal Inti (Tier 1) |
| XI | XII | XIII | XIV |
|  |  |  |  |

Pedoman Pengisian Laporan Pengecualian Penyaluran Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyaluran Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (tier 1) kepada selain Pihak Terkait yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Debitur berupa “unknown client” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “unknown client”.

Bagi Bank yang tidak mempunyai Penyaluran Dana Besar, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan “Nihil”.

1. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 5. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

1. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

1. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
| 1. | Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 2. | Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas |  |
| a. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| b. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| d. Penjaminan | 9940 |
| e Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3 | Pembiayaan | 30 |
| 4. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 5. | Penyertaan Modal | 40 |
| 6. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 7. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 8. | Benutuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 9. | Garansi | 65 |
| 10. | *Letter of Credit* (L/C) | 70 |
| 11. | *Standby Letter of Credit* (SBLC) | 80 |
| 12. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

1. Modal Inti (*tier* 1)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan perlakuan BMPD tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, yaitu dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu | Sandi |
| 1. | Penyaluran Dana kepada pemerintah pusat | 1 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2 |
| 3. | Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia | 3 |
| 4. | Penyaluran Dana yang dijamin oleh pemerintah pusat | 4 |
| 5. | Penyaluran Dana kepada lembaga keuangan yang memenhi persyaratan tertentu | 5 |
| 6. | Bagian Penyaluran Dana yang dijamin oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu | 6 |
| 7. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan agunan tunai | 7 |
| 8. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia | 8 |
| 9. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh Prime Bank | 9 |
| 10. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh Prime Bank | 10 |
| 11. | Penempatan pada bank lain di Indonesia untuk manajemen likuiditas harian | 11 |
| 12. | Penjaminan oleh BUMN/BUMD untuk mendukung program pemerintah | 12 |
| 13. | Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor | 13 |
| 14. | Lainnya | 16 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang memperoleh lebih dari 1 (satu) perlakuan BMPD tertentu, kolom ini diisi dengan bentuk perlakuan BMPD tertentu yang memiliki porsi perlakuan BMPD tertentu paling besar.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah yang Memperoleh Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyaluran Dana Rupiah secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing yang Memperoleh Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyaluran Dana valuta asing secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (Tier 1)

Persentase Penyaluran Dana yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu dengan Modal Inti (tier 1) Bank

Bagian C

LAPORAN PELANGGARAN BMPD ATAU PELAMPAUAN BMPD

Nama Bank : PT Bank… (individu)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | | Penyaluran Dana pada Tanggal Laporan (sebelum Teknik MRK) | | | | | | Modal | Modal Inti |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI | VII.1 | VII.2 | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaminan/Agunan yang Diberikan (Teknik MRK) | | | | | | | | Pelanggaran BMPD | | Pelampauan BMPD | | Kualitas | Keterangan |
| Bentuk Jaminan/ Agunan | Bagian yang Dijamin | Penerbit Jaminan/ Agunan | Peringkat Penjamin | Lembaga Pemeringkat | Tanggal Pemeringkatan | Jangka Waktu | | Nominal | % | Nominal | % |
| Awal | Jatuh Tempo |
| XIII | XIVV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX.1 | XIX.2 | XX.1 | XX.2 | XXI.1 | XXI.2 | XXII | XXIII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAPORAN PELANGGARAN BMPD ATAU PELAMPAUAN BMPD SECARA KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank… (konsolidasi )

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | | Bank | | | | | |
| Nama | Individu/Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | Kurs |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing |
| I | II | III | IV | V | VI | VII.1 | VII.2 | VIII | IX | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(dalam Jutaan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perusahaan Anak | | | | | | Modal Konsolidasi \*) | Konsolidasi | | Pelanggaran BMPD | | Pelampauan BMPD | | Kualitas | Keterangan |
| Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana setelah Teknik MRK | | Kurs | Jumlah Penyaluran Dana | | Nominal | % | Nominal | % |
| Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing | Rupiah | Valuta Asing |
| XI | XII.1 | XII.2 | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XIV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelanggaran BMPD merupakan total Modal atau Modal Inti (tier 1) secara konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi Penyaluran Dana. Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelampauan BMPD merupakan total Modal atau Modal Inti (tier 1) secara konsolidasi pada bulan laporan.

Pedoman Pengisian Laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD

Dalam tabel ini dilaporkan Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD. Dalam hal kelompok Nasabah Penerima Fasilitas melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD, individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dilaporkan dalam tabel ini meskipun individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD.

1. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Debitur berupa “unknown client” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “unknown client”.

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPD atau pelampauan BMPD, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan “Nihil”. Sementara itu, bagi Bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan “SEMUA DEBITUR” dan pada kolom keterangan diisi dengan “Modal Negatif”.

1. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

1. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

1. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

1. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
| 1. | Pihak Terkait |  |
| 1. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| 1. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| 1. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |
| 1. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| 1. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| 1. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| 1. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| 1. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| 1. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| 1. Hubungan keuangan | 0310 |
| 1. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK |  |
| 1. Penjaminan | 0330 |
| 1. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait |  |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 1. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas |  |
| 1. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| 1. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| 1. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| 1. Penjaminan | 9940 |
| 1. Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3 | Pembiayaan | 30 |
| 4. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 5. | Penyertaan Modal | 40 |
| 6. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 7. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 8. | Benutuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 9. | Garansi | 65 |
| 10. | *Letter of Credit* (L/C) | 70 |
| 11. | *Standby Letter of Credit* (SBLC) | 80 |
| 12. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

1. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

1. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Modal Inti (*tier* 1)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

1. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI | 45 |
| 7. | SBN | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

1. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

1. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

1. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
| 1. | Moody’s Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor’s | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

1. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

1. Jangka Waktu
2. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

1. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

1. Pelanggaran atau Pelampauan BMPD dan Penyaluran Dana Besar

Nominal Pelanggaran atau Pelampauan

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPD Nasabah Penerima Fasilitas individu =

{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1)}

1. BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas =

{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1)}

1. BMPD BUMN tertentu =

{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}

1. BMPD Pihak Terkait =

{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

1. Persentase Pelanggaran atau Pelampauan BMPD

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD dibagi Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

(Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD ÷ (Total Modal atau Modal Inti (tier 1)) x 100%

1. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kualitas | Sandi |
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

1. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal…

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO